

Around in early of 1990s, discussions concerning Islamic Economy System (further referred as SEI) in Indonesia were intensely lustrous, such in seminar forums, workshops and even has extended to establishment of mu'amalat-orientated departments in narrow sense i.e. Islamic economy (al-Iqtishadiyyah). For not calling euphoria or "frustrated" over capitalist and socialist economic systems that currently exist, the examination on existence of SEI by some experts still becomes the subject of debate. Some claim that Islam has its own SEI differs from capitalist and socialist economic systems, but others have a conversely opinion. In addition to how followers of Islam comprehend their syar'iyah source (Islamic law) regarding economic matters, the approach to how Islam history itself to be examined, understood and implemented since Islam introduced in Indonesia may also conducted. This writing will describe the thought of SEI Indonesia by means of second approach with system that divided history into periods.

Key Words: Sistem, Ekonomi Islam, Pedagang Muslim dan Commenda.

Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia

Syahbudi

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi pada awal abad 21 ini khususnya pada persoalan ekonomi semakin menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah tidak terdapat lagi sistem ekonomi yang lebih baik, lebih efektif dan efisien di dalam menciptakan rasa keadilan? Di antara persoalan paling mendasar yang hingga kini dihadapi oleh sistem ekonomi kapitalis adalah persoalan kesenjangan dan pemerataan. Meskipun hal tersebut relatif masih dapat diatasi yakni dengan program-program sosial pemerintah atau dengan pengendalian kekuatan militer.¹ Kemudian persoalan termarginal-

¹ Arief Budiman, *Sosialisme, Kapitalisme dan Agama dalam Mencari Ideologi Alternatif; Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21*, Maksu (Edt), (Bandung:

kannya agama dari aspek konsumsi, produksi dan distribusi. Sedangkan sistem ekonomi sosialisme dihadapkan pada persoalan demokratisasi yang dipersimpangan jalan.²

Pada konteks Indonesia, kenyataan tersebut semakin menimbulkan dilema. Di tengah penduduk yang mayoritas adalah Muslim, ketimpangan dan kemiskinan justru berbanding linear. Belum lagi jumlah hutang yang setiap tahunnya terus bertambah.³ Timbul satu kegelisahan bahwa orang-orang Islam secara tidak langsung dituntut untuk bertanggung jawab mencari solusi bagaimana membawa kondisi nasib bangsa ini ke arah yang lebih baik. Menjadi bangsa yang *independent* dan bukan *dependent*, bangsa yang mandiri yang mampu menampilkan diri sendiri dan bukan menjadi bangsa yang lemah dan inferior. Perekonomian umat Islam Indonesia saat ini, masih terlalu jauh ketinggalan oleh perekonomian masyarakat non-muslim, bahkan menurut laporan resmi (Januari 1998) terdapat 25 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan rata-rata pendapatan hanya Rp. 150.000 per kapita pertahun atau sama dengan Rp. 400 per kapita perhari. Di antaranya tersebut mayoritas adalah umat Islam.⁴

Semaraknya SEI dijadikan sebagai sistem alternatif ekonomi, sebenarnya tidak hanya melanda Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia Islam.⁵ Landasan yang paling kokoh tentunya selain merujuk kepada al-

Mizan, 1995), p. 17

² *Ibid.*

³ Setidaknya hutang luar negeri Indonesia hingga awal 2003 telah mencapai Rp. 700 trilyun.

⁴ M. Amin Aziz, "Nilai-Nilai Pengembangan Perekonomian dan Perbankan", dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah; Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia, Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A. Rasyid (Edt.) (t.t.p.: Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK, 2000) p. 123.

⁵ Menurut Abdul Mannan terdapat tiga alasan untuk mengembangkan teori ekonomi Islam: 1. Untuk belajar dari pengalaman terdahulu dengan mengidentifikasi alasan tentang kewajaran atau ketidakwajaran penjelasan perilaku dan praktek ekonomi yang lampau dengan teori ekonomi Islam. 2. Untuk menjelaskan keadaan ekonomi yang aktual betapapun masih bersifat fragmentednya keadaan itu. 3. Untuk mengidentifikasi "kesenjangan" antara teori ekonomi Islam yang ideal dan praktek-praktek masyarakat muslim kontemporer, sehingga usaha untuk mencapai suatu yang ideal dapat diwujudkan. M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, M. Sonhadji, dkk (Edt.) (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), p. 15.

Qur'an dan Hadis juga merujuk kepada perilaku nabi dan para sahabat serta tabi'in baik dari sisi pemikiran maupun gerakan kelembagaan yang berhubungan dengan ekonomi. Pada dataran praksis, keinginan diberbagai tempat untuk melaksanakan SEI tentunya mengalami perbedaan-perbedaan. Sebab diyakini, perbedaan lokus, tempus dan situs membawa konsekuensi pada perbedaan di dalam realitas-praktisnya. Oleh karena itu, melacak kesejarahan SEI tidak hanya berhenti pada masa Rasullullah SAW dan tiga generasi berikutnya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat esensi dari sebuah kesejarahan adalah bersifat dinamis (baca: *continuity and change*). Dialektika antara SEI dengan realitas kekinian setidaknya memberikan harapan yang besar, bahwa SEI tidak berhenti hanya pada teks-teks dan wacana-wacana suci yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan.⁶

Pada awal perjuangan pergerakan kemerdekaan, semangat bangsa ini untuk betul-betul lepas dari segala sistem kolonialisme dan imperialisme cukup besar.⁷ Baik dari sistem politik maupun ekonomi.⁸ Di antara situasi tersebut, kontribusi perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, tentunya cukup signifikan. Pertanyaan yang muncul adalah, di tengah-tengah belantara perjuangan yang terjadi saat itu khususnya dalam bidang

198

⁶Dalam konteks yang lebih umum, Mohammed Nejatullah Shiddiq bahkan menandakan: Pemikiran ekonomi Islam berusia setua Islam. Sepanjang 14 abad sejarah Islam kita menemukan studi yang berkelanjutan tentang isu ekonomi dalam pandangan syari'ah. Sebagian besar diskusi ini hanya terkubur dalam literatur tafsir al-Qur'an, Sarah Hadis, dasar-dasar hukum, ushul fiqh dan hukum fiqh. Belum ada usaha yang dilakukan untuk mengkaji lebih dalam materi-materi ini dan menyajikannya secara sistematis. Yang kita miliki hanya makalah-makalah yang kebanyakan ditulis setelah abad pertengahan tentang pemikiran ekonomi sarjana-sarjana Islam di masa lalu. Lihat Mohammad Nejatullah Shiddiq, "Studi Terkini Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Survei", dalam *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarman Karim (Edt) (Jakarta: IIIT, 2000), p. 3.

⁷Sistem ekonomi yang berlaku saat itu adalah kapitalisme atau sistem ekonomi pasar dengan sisa-sisa feodalisme. Lihat L. Didin S. Damanhuri, "Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam", dalam *Muhammadiyah dan Reformasi (Almanak Muhammadiyah 1420 H)*, Nurhadi M. Musawir, dkk (Edt.) (Yogyakarta: Aditya Media, 2000) p. 155.

⁸Perdebatan ini hingga memunculkan stressing pembangunan antara yang "haluan sejarah" diwakili oleh Soekarno dan "haluan ekonomi" yang diwakili Hatta. Lihat Benjamin Higgins, *Indonesia's Economic Stabilization and Development* (New York: t.n.p., 1959), p. 103-104. Sartono Kartodirjo (Edt), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), p. 217.

ekonomi, apa dan bagaimana umat Islam memberikan kontribusinya? Apakah bibit semangat SEI dalam kontribusi tersebut juga telah muncul? Dan bagaimana pula bentuknya?⁹

Inilah beberapa masalah yang menjadi *stressing point* pada pembahasan tulisan berikutnya. Ringkasnya, tulisan ini berupaya untuk melacak eksistensi pemikiran dan gerakan Sistem Ekonomi Islam (SEI) di Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia, jaman pergerakan kemerdekaan hingga awal abad 21.

B. Umat Islam dan Ofensifitas Gerakan dan Pemikiran

Sumber-sumber yang berusaha menjelaskan perjalanan sejarah pemikiran Sistem Ekonomi Islam sudah cukup banyak. Hanya saja fokus pembicaraannya disekitar kondisi yang terjadi pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in. Sedangkan untuk kondisi Indonesia sendiri –hingga tulisan ini diselesaikan- masih belum ditemukan. Jikapun ada, pembahasannya masih mengandung imitasi konsep pada masa Nabi dan tiga generasi setelah nabi dengan berusaha “memaksakannya” dalam dataran praksis secara filsafat. Akibatnya, pemikiran sistem ekonomi yang muncul belum dapat di sebut sebagai teori sistem ekonomi Islam melainkan hanya sekedar filsafat ekonomi Islam.¹⁰

Mujahid Quraisy sendiri dalam salah satu artikelnya tentang “Dinamika Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia” berpendapat, bahwa gerakan ekonomi Islam tidak hanya sekedar menjadi ideologi-normatif, tetapi berusaha menjawab ketimpangan yang diakibatkan oleh sistem ekonomi pasar yang telah menciptakan jarak di tengah-tengah kehidupan sosial-

⁹Pertanyaan di atas juga semakin menguat pasca runtuhnya sistem monarki di Asia yang diawali dari Jepang kemudian disusul oleh negara-negara “Macan Asia” seperti Taiwan, Korea, Hongkong dan Singapura yang sering disinyalir memiliki keterkaitan yang erat antara “semangat naga” serta confusianism dengan semangat membangun ekonomi. Bahwa nilai-nilai agama telah menjadi sumber nilai bagi tumbuhnya etos dan pembangunan yang lebih rasional. L. Didin S. Damanhuri, “Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam”..., p. 165.

¹⁰Bandingkan dengan pendapatnya M. Dawam Rahardjo, “Sejarah Ekonomi Islam (Pengantar)”, dalam *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Adiwarmanto Karim* (Edt) (Jakarta: IIIT, 2000), p. xiii. Lihat juga Khoiruddin Nasution, “Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam”, dalam *Millah*, Vol. III No. 2, Januari 2002, p. 13-23.

ekonomi masyarakat.¹¹ Sehingga meskipun berbicara mengenai sejarah gerakan, namun yang paling disoroti adalah perkembangan gerakan ekonomi Islam kontemporer.¹² Sisi lain yang membedakannya dengan tulisan ini, digunakannya istilah pemikiran dan gerakan. Hal ini disebabkan beberapa hal: pertimbangan pemikiran lebih esensial di dalam melihat sesuatu daripada gerakan. Sebab dalam banyak hal, gerakan pasti mengandung pemikiran-pemikiran. Namun sebaliknya, setiap pemikiran –mungkin disebabkan oleh situasi sosial-politik yang tidak mendukung-belum tentu menjadi sebuah gerakan. dalam cakrawala dinamika pemikiran lebih terbuka untuk berdialog daripada setelah menjadi sebuah gerakan.

Dari keseluruhan tulisan tersebut, khususnya data mengenai kuantitas perkembangan lembaga-lembaga yang beraroma ekonomi Islam cukup membantu kekosongan dari tulisan berikut ini. Hanya saja bagaimana dinamika gerakan sosial-keagamaan di dalam merespon kebutuhan terhadap sistem ekonomi alternatif kurang mendapat perhatian.

Di samping persoalan kemiskinan, pengangguran dan kejahatan sosial, sesungguhnya tantangan terbesar bagi kelompok umat Islam sekarang termasuk Indonesia adalah bagaimana mempertahankan identitas tanpa harus terperosok jatuh ke dalam bahaya alienasi atau isolasi diri, dan bahaya menolak andil orang lain serta bagaimana menghadapi kebudayaan masa kini tanpa terhanyut ke alam bahaya pemikiran buta (taqlid). Dalam banyak persoalan, umat Islam masih sering mengedepankan ofensifitas wacana gerakan maupun pemikiran baik dalam menghadapi isu yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Hal seperti ini sangat tidak menguntungkan dalam konteks persaingan globalisasi. Umat Islam akan lebih menjadi penonton yang memiliki kemahiran menilai tetapi nihil berbuat. Semangat menemukan pemikiran SEI tidak hanya sekedar *phobi* memakai sistem ekonomi Barat atau karena dibalut semangat Islam yang buta. *Toh*, dalam beberapa hal Islam sendiri berdiri di antara realitas kapitalisme dan sosialisme. Secara umum Islamisasi yang terjadi saat ini, mengalami tiga tipologi. Ada yang berasumsi bahwa respon Islam terhadap

¹¹Mujahid Quraisy, "Dinamika Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia", dalam *Muqaddimah* No. 12 Tahun. VII, 2002, p. 65.

¹²*Ibid.*, p. 69-77.

persolan kontemporer adalah bersifat integratif. Adalagi yang berpendapat bahwa hubungan Islamisasi tidak lebih sekedar bersifat substansialistik. Namun ada pendapat yang meyakini Islam dan persoalan kontemporer bersifat simbolik-formalistik. Mana diantaranya yang benar dan salah bukanlah menjadi agenda utama, tetapi bagaimana mampu memberikan ruang yang cukup besar bagi pemberdayaan dan kesejahteraan umat Islam. Menurut Robert W. Hafner seorang sosiolog sekaligus Indosianist melihat ada tiga aliran utama pemikiran ekonomi Islam (baca: muslim). , Aliran nasionalis-statis, yang secara dekat identik dengan orientasi pengembangan kelas bisnis, tekhnologi ilmiah, manajemen modern dan peningkatan kualitas pendidikan. Nasionalis-statis cenderung setengah-setengah atau bahkan tidak menyukai detil-detil teknis “ekonomi Islam”. Aliran ekonomi Islam populis yang tetap mendukung intervensi pemerintah terhadap ekonomi Muslim (baca: Islam) dengan cara distribusi yang lebih adil dan terbuka, antusiasme terhadap ekonomi Islam melalui lembaga-lembaga keuangan syari’ah, penyaluran zakat kepada koperasi untuk orang miskin, dsb. Aliran pemikiran ekonomi Islam liberal; menyatakan bahwa selain semangat kejujuran dan keadilan sosial, tidak ada lagi alternatif Islam untuk ekonomi pasar.¹³

C. SEI Di Persimpangan Jalan

Mengapa perjalanan Sistem Ekonomi Islam selama ini masih belum menemukan titik yang sesungguhnya? Hal ini disebabkan beberapa hal: pembahasan yang menjadi *mainstream* berkisar seputar dataran ontologis. Yakni berusaha mencari obyek perbedaan antara SEI dengan sistem ekonomi konvensional.¹⁴ berusaha bagaimana merekonstruksi

¹³Lihat Robert W. Hefner, “Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Indonesia”, dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam; Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), p. 253-257.

¹⁴Hal senada juga telah diungkapkan oleh M. Akhyar Adnan yang meyebutkan bila secara ontologis ada perbedaan, maka perbedaan sudah barang tentu terjadi pada tataran epistemologis dan aksiologisnya. Beliau berangkat dari sebuah kenyataan, bahwa kritik terhadap sistem ekonomi konvensional yang memang sangat terasa kering dari wacana etik dan nilai-nilai humanis yang sejatinya tidak pernah lepas dari kemanusiaan manusia itu sendiri. Karena pada kenyataannya, ilmu ekonomi yang semula diharapkan mampu menjawab pertanyaan bagaimana masyarakat secara keseluruhan mencapai kesejahteraan justru menghasilkan sebaliknya. Lihat Muhammad Akhyar Adnan,

sistem ekonomi kapitalis dan sosialis khususnya menjadi sistem yang berwawasan Islam.

Tokoh seperti Mr. Syafruddin Prawiranegara dan Ace Partadiredja setidaknya terkesan masih menyangsikan apakah SEI itu memang ada dan dapat disusun sebagai "a distinct concept". Menurut mereka, yang jelas ada hanyalah nilai-nilai Islam mengenai kehidupan berekonomi (substansialistik). Artinya, nilai-nilai tersebut yang seyogyanya mewarnai atau menjiwai tingkah laku berekonomi dalam suatu sistem perekonomian sebagai sifat universalisme Islam. Sebaliknya Muhammad Nejatullah Siddiqi dan M. Dawam Rahardjo beranggapan bahwa SEI memiliki konsep atau teori tersendiri. Setidaknya dapat disusun dengan mengambil perbedaan antara sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. SEI yang dimaksudkan adalah suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam.¹⁵

Sistem menurut bahasa berarti: "keseluruhan yang kompleks, suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan".¹⁶ Dari arti bahasa "sistem" tersebut lebih jauh Mannan berpandangan bahwa ekonomi Islam itu sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata kehidupan yang lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diwahyukan (baca: al-Qur'an), praktek-praktek yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, deduksi analogik, penafsiran berikutnya dan konsensus yang tercapai kemudian dalam masyarakat Islam atau oleh para ulama melalui ijma'.¹⁷

"Metodologi Ekonomi Konvensional dan Penelitian Ekonomi Islami", dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, M. Amin Abdullah, dkk (Edt.) (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), p. 293-301.

¹⁵M. Dawam Rahardjo, "Sistem Ekonomi Alternatif", dalam *Sepercik Pemikiran tentang Ekonomi Islam*, M. Natsir Arsyad (Penyt.) (Yogyakarta: Ananda, 1985), p. 3-4.

¹⁶System dapat berarti; Methode or plan of classification, orderly way of doing something. Noah Webster, Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged, Second Edition (t.t.p.: William Collins Publisher, Inc., 1980), p. 18351. Dalam arti yang lebih luas sistem mencakup 1. Something consisting of a set (finite or infinite) of entities. 2. Among which a set of relations is specified. 3. Deductions are possible from some relations to others or from the relations among the entities to the behavior or history of the system. David L. Sills (Edt.) *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 15 (New York: The Mac Millan Company & The Fred Press, 1972), p. 453.

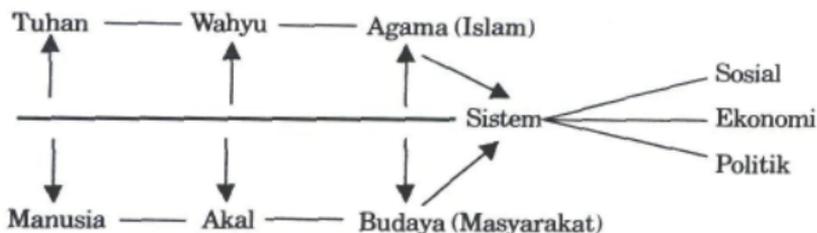
¹⁷M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...*, p. 15.

Goenawan Muhammad secara deskriptif menjelaskan, bahwa mempelajari SEI sebagai suatu sistem, maka harus ditelaah struktur dan pelaksanaan sistem ekonomi tersebut yang disebut dengan institusi. Institusi adalah serangkaian norma, aturan tingkah laku atau cara berfikir yang sudah mantap.¹⁸ Dan Islam menurut Goenawan memiliki institusi yang hampir sama dengan sistem ekonomi modern.

Munculnya alternatif ekonomi, sejatinya memberikan harapan yang lebih baik dengan mengisi kekosongan sistem kapitalis dan sosialis. Pelabelan Islam hanyalah persoalan menyangkut nama. Namun yang terpenting bagaimana sistem ekonomi alternatif tersebut dijiwai oleh semangat Islam. Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi Islam, yaitu:

Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*injunction*) dan tata cara (*rules*) yang ditetapkan oleh syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.¹⁹

Ringkasnya, apakah Islam memiliki sistem ekonomi tersendiri. Jawabannya "Ya". Untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan sebagai berikut:



¹⁸ Ibid.,

¹⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat [LSAF], 1999), p. 10.

Sehingga implikasinya dalam bidang ekonomi dapat terlihat sebagai berikut:

(A) Ilmu Ekonomi Islam	(B) Ilmu Ekonomi Modern
Manusia Makhluk Sosial-Religius	Manusia Makhluk Sosial
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Kebutuhan-Kebutuhan Tidak Terbatas</div> <div style="text-align: center;">Kekurangan Sarana</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Kebutuhan-Kebutuhan Tidak Terbatas</div> <div style="text-align: center;">Kekurangan Sarana</div> </div>
Masalah-Masalah Ekonomi	Masalah-Masalah Ekonomi
Alternatif Pilihan yang Dituntun oleh Nilai Islam	Alternatif Pilihan yang Dituntun oleh Kepentingan Diri Individual
Pertukaran Terpadu dan Transfer Satu Arah Dituntun oleh Etika Islam, Kekuatan Pasar dan Kekuatan Non-Pasar	Pertukaran Dituntun oleh Kekuatan Pasar

Ringkasnya, inti dari setiap sistem bahwa aksentuasi pemikiran ataupun gerakan sangat dipengaruhi cara pendekatan kelompok muslim tersebut secara sadar dan bertanggung jawab dalam memahami ortodoksi Islam beserta kenyataan aktivisme sejarah. Hal ini penting, agar umat Islam tidak terjebak kepada sikap-sikap yang mengedepankan pragmatisme²⁰ dan simbolisasi²¹ Islam serta opensifitas pemikiran dan gerakan.

D. Anatomi Pemikiran dan Gerakan SEI di Indonesia

Sebelum sampai pada tahap kategorisasi sejarah gerakan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia, yang menjadi landasan pokok di dalam memahami sud-judul tersebut adalah sejak datang atau masuknya Islam ke

²⁰ Dalam beberapa kelompok masyarakat muslim terdapat praktek-praktek rentenir yang telah mendarah daging. Namun selama dianggap tidak merugikan, maka tidak ada usaha untuk merubah sistem tersebut. Sehingga pada gilirannya, apakah sesuai dengan prinsip Islam atau tidak, bukan menjadi soal.

²¹ Pandangan ini merupakan kebalikan dari yang pertama. Sehingga seluruh sistem harus berbau "Islam", meskipun pada praksisnya belum tentu menjadi kebutuhan yang esensial.

Indonesia. Artinya berbicara Islam di Indonesia apapun bentuk wacananya, harusnya diawali sejak Islam masuk dan berkembang ke Indonesia hingga saat sekarang ini.

Meskipun demikian, secara umum anatomi pemikiran SEI Islam di Indonesia dapat dikategorisasikan dengan tiga periodisasi. periode **pertumbuhan**. Periode ini diawali oleh semangat misi dakwah Islam yang dibawa oleh para pedagang Muslim dan Walisanga ke wilayah Nusantara (Baca: Indonesia). Diperkirakan abad ke-7 hingga akhir abad ke-15. Ciri utama dari periode pertumbuhan ini adalah antara perilaku para pedagang dengan kesadaran berekonomi secara Islam masih belum terungkap secara jelas. Ekonomi hanya sekedar menjadi alat bagi misi dakwah. Demikian juga pada abad-15, masa dimana Walisanga menyebarkan Islam lebih berkonsentrasi pada persoalan tajdid dalam hal pembaharuan pemahaman keagamaan. eriode perkembangan: ditandai dengan semangat untuk mengejewantahkan SEI ke dalam satu lembaga keuangan modern. Periode perkembangan ini diawali abad-16 hingga akhir abad-18 dengan ciri utamanya, keinginan untuk berekonomi secara Islam sudah mulai tumbuh. Puncak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara salah satunya menjadi pendukung asumsi tersebut. Terakhir, periode pembentukan. Periode ini diawali setelah kemerdekaan RI dan menemui titik kulminasinya pada dekade 90-an atau abad-21 hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan menjamurnya lembaga-lembaga keuangan yang bercirikan Islam. Undang-undang yang peluang memungkinkan untuk terbentuknya lembaga keuangan umat Islam juga semakin terbuka lebar.

1. Periode Pertumbuhan

Secara umum periode pertumbuhan dapat disebut dengan periode dakwah. Keterkaitan yang bersifat simbiotik terlihat antara penguasa raja-raja saat itu dengan para pedagang muslim. Jika para pedagang butuh rempah-rempah, maka para raja butuh uang untuk kas kerajaan. Pada periode ini, semangat berekonomi secara tuntunan Islam belum menjadi satu kesadaran yang terorganisir. Kemajemukan budaya para pedagang sendiri bertemu dengan semangat agama Hindu raja-raja yang masih kuat, menjadikan sistem kontrak yang dilakukan sangat variatif. Jika tidak, sulit bagi para pedagang muslim untuk menjalin kontrak kerjasama ekonomi

dengan para raja yang memiliki sumber daya alam kaya tersebut. Ringkasnya, perilaku berekonomi yang secara sadar terorganisir dan sesuai syari'at Islam, muncul setelah misi dakwah menemui titik solidaritas sosialnya.

Menarik sejenak mempertimbangkan hipotesa Munir Mul Khan, yang berpendapat; banyak peneliti menyatakan bahwa proses Islamisasi di Indonesia khususnya melalui jalur komunikasi dagang tepatnya pada saat para pedagang beristirahat di setiap daerah singgahan yang kemudian mereka menyebarkan Islam dan berdakwa. Kebenaran pernyataan tersebut masih perlu diuji, mengingat pola Islamisasi dengan sistem penyebaran dan komunikasi pengetahuan di luar sistem perdagangan yang sebenarnya telah menjadi tradisi risalah Muhammad SAW dan kepemimpinan Khulafaur Rasyidun.

Adalah kenyataan, dalam dinamika komunikasi tersebut melibatkan aspek hubungan sosial yang luas, yang antara lain perdagangan. Dalam sistem ajaran Islam, bekerja dan berdagang merupakan kewajiban individual, sementara komunikasai dakwah justru merupakan kewajiban sosial yang bisa saja mengambil bentuk hubungan sosial melalui jalur atau diluar jalur perdagangan.

Dari cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, dapat dilihat bahwa masuknya Islam tokoh puncak di Jawa Sunan Kalijaga bukan oleh akibat komunikasi dagang, akan tetapi kontak personal tanpa aspek dagang. Sampai hari ini, secara umum *tidak terdapat motivasi ekonomi bagi seseorang yang melakukan dakwah, menyampaikan pengetahuan tentang ajaran Islam kepada masyarakat. Jika kemudian terdapat aspek ekonomi dalam kegiatan tersebut, adalah semata-mata sebagai kepentingan bersama komunitas Islam itu sendiri. Sehingga semangat berdagang bukan substansi gerakan Islamisasi itu sendiri, tetapi lebih sebagai anteseden dari gerakan Islamisasi. Aspek ekonomi dan politik, muncul kemudian sebagai konsekuensi keberhasilan dakwah.*²²

Meskipun periode ini jika didasarkan pada pendapatnya Munir Mul Khan misi dakwah tidak memiliki hubungan dengan ekonomi, tidak

²² Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Prespektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), p. 130.

dapat dipungkiri bahwa para pedagang muslim sangat memiliki andil besar di dalam mengkonstruksi pola pikir penduduk nusantara yang sangat didominasi oleh agama Hindu, bahwa sistem ekonomi pedagang muslim cukup dapat diterima.

Sebagaimana pendapatnya Zaini Dahlan, bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim sekaligus pengalaman yang mereka lakukan setiap hari. Tertarik oleh sikap perilaku para pedagang, penduduk Indonesia kemudian mengikuti dan menerima ajaran-ajaran Islam. Ini berarti bahwa Islam datang di Indonesia pada mulanya bukan lewat penalaran dan pemikiran tetapi lewat percontohan.²³ Dengan demikian keberhasilan para pedagang Muslim sangat memiliki peran penting dalam proses konversi di Indonesia. Secara logika dapat dipertimbangkan, jika sistem ekonomi yang dibawa merusak tatanan rasa keadilan dan kedamaian masyarakat kuat keyakinan saya bukan hanya pedagang muslimnya yang tertolak, bahkan Islam sendiri secara otomatis juga ditolak.

Hal ini diperkuat dengan kondisi corak perekonomian dengan sistem kekuasaan ekonomi raja yang absolut. Raja merupakan pusat dari setiap harmoni dan keseimbangan yang disebut dengan *cronies* kerajaan. Jadi keberhasilan para pedagang selain tingkah laku mereka yang dinilai baik juga keberadaan mereka yang berada pada lingkaran *cronies* kerajaan, seperti menikah dengan putri raja-raja.

2. Periode Perkembangan

Pada periode ini yang diawali sekitar akhir abad-13 dan abad-18, di mana kerajaan-kerajaan Islam menemui titik sentrumnya, semangat berekonomi yang terorganisir sesuai syari'at Islam juga mulai muncul. Salah satunya adalah, menjamurnya daerah koloni-koloni yang khusus berpenduduk muslim pedagang. Catatan sejarah yang paling jelas sekitar abad-17 menunjukkan di mana para bangsawan dan raja di Indonesia seperti halnya bangsawan-aristokrat di Belanda sangat berperan penting

²³ Zaini Dahlan, "Kondisi Kesadaran Hukum Umat Islam kepada hukum Islam dan Peradilan Agama", dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Dadan Muttaqien, dkk (Edt.) (Yogyakarta: UII Press, 1999), p. 15. Lihat juga Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*; Bagian Kesatu dan dua, Alih Bahasa Ghufuran A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), p. 719-721.

dalam ekonomi perdagangan di Nusantara, terutama dalam investasi permodalan, pemilikan kapal dagang, penguasaan perdagangan, pengelolaan bandar dan pasar, pengamanan bandar dan monopoli bahan perdagangan pokok. Mirip dengan sistem kelembagaan perdagangan yang berlaku di daerah kesultanan di Asia Barat dan Asia Selatan, di wilayah kesultanan Nusantara juga berlaku sistem kelembagaan kemitraan dagang (*partnership* atau *syarikah*, *mufawadah*) dan sistem *commenda* atau kepemilikan modal (*qirad*, *mudarabah*).²⁴

Sistem kemitraan dagang dilakukan apabila adanya “kesetaraan” antara dua orang atau lebih dalam kekayaan dan kedudukan sosialnya. Salah satunya adalah kemitraan dagang dengan sistem *commenda*²⁵

Commenda pada hakikatnya merupakan bentuk sistem perjanjian bagi hasil keuntungan antara para penanam modal atau pemilik barang dengan para pedagang yang pergi berlayar atau berkeliling menjajakan barang dagangannya ke tempat jauh. Ringkasnya, sistem *commenda* menjadi cukup penting dalam mendasari kemajuan usaha perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara dan kepulauan Nusantara.²⁶

Selain raja-pedagang dan kaum bangsawan, telah juga muncul saudagar-santri yang oleh karenanya antara berdagang dan berekonomi sulit untuk dipisahkan.²⁷ Periode ini juga memperlihatkan hubungan yang interaktif antara sultan, ulama dan pedagang cukup baik. Kemudian dengan datangnya VOC pada abad-18, sistem ekonomi kesultanan tadi khususnya

²⁴ Joko Suryo, “Ekonomi Masa Kesultanan”, dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam (Dinamika Masa Kini)*, Taufiq Abdullah, dkk (Edt.), Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), p. 281.

²⁵ Sistem *commenda* ini, sering dilakukan antara para raja, bangsawan serta saudagar kaya dan para nakhoda atau pedagang yang melakukan pelayaran keliling yaitu di bandar Malaka, Aceh, Banten, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Surabaya dan di bandar lainnya. Apabila kondisi pelayaran dan perdagangan antara Malaka, Jawa dan tempat lain lancar serta ramai, maka keuntungan yang diperoleh para pemilik modal dapat mencapai 100 % sampai 200 %. Sudah barang tentu para nakhoda dan pedagang penajanya juga memperoleh keuntungan yang tidak sedikit. Tidak jarang kemitraan dagang ini banyak dilakukan oleh sesama saudagar atau pedagang muslim pada satu kota bandar ataupun sesama anggota keluarga saudagar atau pedagang kaya. Apakah sistem ini dapat dikatakan mengakomodir sistem kasta Hindu, masih butuh penelitian lebih lanjut. (Penulis) *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, p. 282.

ekonomi muslim mulai memudar dan beralih dengan kebangkitan ekonomi kolonial.

3. Periode Pembentukan

Pasca kejatuhan sistem ekonomi muslim akhir abad-18, pada tanggal 1 Januari 1800 nasib VOC berakhir di Indonesia. Kemudian diambil alih oleh Belanda yang salah satu agenda ekonominya adalah mengenalkan sistem kapitalisme Barat, yang sarat dengan birokrasi, bank dan bunga bank. Sehingga pergulatan sistem ekonomi lebih pada penolakan terhadap sistem bunga bank yang dianggap padanannya rente dan sistem kolonialis yang monopolistik. Jika pada masa pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi masih di dasari saling percaya yang kuat, maka pada masa pembentukan ini semuanya menjadi sistem birokrasi yang ketat. Untuk merespon persoalan bank dengan sistem bunga tersebut, Muhammadiyah misalnya sebagai salah satu organisasi sosial, setidaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melihat bibit SEI di Indonesia.²⁸

K.H. Ahmad Dahlan²⁹ sebagai pendiri Muhammadiyah³⁰ merupakan figur pedagang yang ulet dan memiliki solidaritas sosial yang kuat, sehingga menimbulkan asumsi bahwa Ahmad Dahlan sebenarnya sangat dimungkinkan memiliki konsep ekonomi tersendiri menurut Islam. Hanya saja, bahwa untuk menemukan dokumen-dokumen penting tentang pemikiran-pemikiran ekonomi beliau adalah pekerjaan yang sulit. Bahkan

²⁸ Bandingkan dengan pendapatnya M. Dawan Rahardjo yang menyebutkan bahwa dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal dua pendekatan: pertama, sejarah yang memdeskripsikan evolusi pemikiran, yang bersumber dari beberapa pemikir. Kedua, menceritakan riwayat hidup dan pemikiran tokoh-tokoh pemikir besar. Adiwarmanto Karim (Edt), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIIT, 2000), p. xii.

²⁹ K.H. Ahmad Dahlan nama kecilnya Muhammad Darwis, lahir pada tahun 1868 di kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya seorang imam dan khatib Masjid Besar Kauman bernama K.H. Abu Bakar dan ibunya bernama Siti Aminah binti K.H. Ibrahim seorang penghulu besar Yogyakarta. Ahmad Dahlan merupakan anak ke-4 dari tujuh bersaudara. Mohammad Damami, *Akar Gerakan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), p. 81.

³⁰ Meskipun ide dan gagasan tersebut jauh hari telah dirintis oleh Ahmad Dahlan sejak tahun 1896. Secara resmi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 Nopember 1912 M/8 Dzulhijjah 1330 H. Yunus Salam, *Riwayat Hidup K.H. Ahmad Dahlan; Awal dan Perjuangannya* (Jakarta: Depot Pengadjaran, 1968), p. 32.

beberapa buku yang berbicara mengenai dinamika internal dan eksternal Muhammadiyah juga kurang menyentuh aspek pemikiran dan gerakan ekonomi beliau.³¹

Dari data sejarah yang terekam menjadi sebuah loncatan pemikiran yang monumental pada jamannya adalah semangat pemikiran pendirian Bank Muhammadiyah. Beberapa tahun sebelum Jepang masuk, K.H. Mas Mansur Ketua Pengurus Muhammadiyah telah merencanakan pendirian Bank Muhammadiyah yang merupakan ketetapan kongres Muhammadiyah ke-26 tahun 1937. Beberapa pokok pandangan Muhammadiyah di bidang ekonomi pada masa sebelum kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperbaiki ekonomi rakyat, maka diperlukan suatu kapital yang diperoleh dari simpanan ummat yang memiliki kelebihan baik perseorangan ataupun kelembagaan.
- b. Dengan kapital tersebut, maka dapat diharapkan terbentuknya *capital vorming*, untuk itu harus ada keuntungan. Keuntungan demikian dapat diperoleh melalui koperasi yang bekerja tanpa kapital yaitu; koperasi penjualan hasil produksi, koperasi keperluan rumah tangga dan koperasi simpan pinjam. Modal utama itu telah dimiliki oleh Muhammadiyah yaitu rasa kesatuan.
- c. Muhammadiyah memiliki tenaga kerja dan pasar, namun kurang memiliki kapital dan manager. Oleh karena itu, perlu *capital vorming* yang dicapai dengan mendirikan Bank Muhammadiyah. Lembaga tersebut merupakan tulang punggung perekonomian Muhammadiyah yang dijalankan dengan prinsip tanpa riba.
- d. Untuk menyelenggarakan bank demikian dapat dilakukan antara lain dengan:
 1. Menerima simpanan uang dengan pemberian laba.
 2. Menerima simpanan barang dengan bea administrasi.

³¹Yang sering menjadi pembahasan utama adalah masalah masa depan gerakan tajdid kaitannya dengan kehidupan sosial, politik dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia. Lihat Maryadi dan Abdullah Ali (Edt.), *Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000). Edi Suandi hamid, dkk (Penyt.), *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah* (Yogyakarta: UII Press, 2000) kecuali tulisannya M. Dawam Rahardjo. Juga Abdul Munir Mulkhan, *Menggugat Muhammadiyah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2000).

3. Menerima jasa pengiriman uang dan barang serta meminjamkan uang.
 4. Mendirikan usaha seperti pabrik, biro perjalanan, perkebunan dan pertanian.
- e. Adapun modal Bank diperoleh dari:
1. Iuran 1 gulden bagi setiap anggota Muhammadiyah.
 2. Hasil penjualan saham kepada anggota Muhammadiyah
 3. Mencari simpanan dan pinjaman modal.³²

Selanjutnya dalam menanggapi permasalahan bidang ekonomi khususnya bank, Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Muktamar di Sidoarjo, Jawa Timur memutuskan bahwa bunga bank yang dikelola oleh swasta hukumnya haram. Sementara bank pemerintah, Muhammadiyah mengambil ketetapan bahwa hukumnya mutasyabihat.³³ Dan boleh menggunakannya jika dalam keadaan terpaksa dikarenakan keperluan yang sangat mendesak.³⁴ Namun semangat tersebut hanya sebatas tulisan di kertas. Pemikiran untuk berdirinya bank Muhammadiyah gagal karena pada saat itu dianggap mengandung SARA dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas politik.³⁵

211

Nahdatul 'Ulama (NU) sendiri pada putusan utama Muktamar tanggal 9-11 Oktober 1927 di Surabaya tidak saja membicarakan soal-soal ibadat, tetapi juga mu'amalat seperti perbankan, perpajakan, jual beli dan sistem perekonomian Islam. Namun lagi-lagi kurang begitu maksimal dalam pengejawantahannya. Kalah dengan persoalan lainnya seperti politik. Hal ini terlihat ketika memasuki fase berikutnya; konsentrasi pikiran dan gerakan umat Islam akhirnya terkuras pada perjuangan politik untuk kemerdekaan dan isu tajdid. Isu nasionalisme dan purifikasi lebih kental daripada isu ekonomi. Akibatnya persoalan ekonomi menjadi *second opinion*.

³² Abdul Munir Mulhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), p. 116-117.

³³ *Ibid.*,

³⁴ PP. Muhammadiyah, *Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Bandung: Sumber Jaya, 1971), p. 309-312.

³⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), p. 71.

Selanjutnya, pada periode ini sekitar tahun 1990-an, pemikiran dan gerakan SEI berkembang dalam dua tataran, yakni tataran teoritis dan praktis. Pada tataran teoritis dikembangkan melalui pendidikan tinggi,³⁶ kajian keilmuan dan perkembangan riset-riset Islamisasi ekonomi. Pada tataran praktis dikembangkan mulai dari sektor moneter, bank umum, BPRS, BMT, pengembangan pengelolaan zakat produktif, asuransi dan bursa saham Islam serta pegadaian Islam.³⁷

Gagasan berdirinya lembaga-lembaga yang berlabel atau mengandung nilai-nilai Islam seperti bank Islam di Indonesia,³⁸ BPRS,³⁹ BMT bahkan lembaga arbitrase Islam⁴⁰ di atas tadi menandai bahwa era untuk lebih menampilkan SEI secara sadar lebih terbuka. Khusus untuk lembaga arbitrase (hakam) sebenarnya telah di kenal sejak zaman Pra-Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir setiap

³⁶ Untuk lebih jelasnya lihat Mujahid Quraisy, "Dinamika Gerakan...", p.77.

³⁷ *Ibid.*, p. 70.

³⁸ Sejarah ringkas berdirinya BMI secara konkret pada saat loka karya "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide tersebut ditindak lanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid pada tanggal 22-23 Agustus 1990. Akhirnya dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991, tanggal 5 Nopember 1991. Izin usaha Keputusan Menteri Keuangan RI No. 430/KMK: 013/1992 tanggal 24 April 1992 bahwa pada tanggal 1 Mei 1991 Bank Mu'amalat Indonesia dapat memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya. Perkembangan Bank Syari'ah mulai menapat angin segar lagi berdasarkan UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3, bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah. Lihat Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan...*, p. 73-74. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p. 25.

³⁹ Kemudian berlanjut dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang status hukumnya di sahkan dalam Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan, melalui PAKTO SK Menkeu No. 1064/KMK.00/1988 pada tanggal 27 Oktober 1988 pada hakekatnya merupakan penjelmaan model baru dari sistem lumbung desa dan bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak akhir 1890-an hingga 1967. BPRS bekerja jug atas dasar UU No 10 tahun 1998. Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan...*, p. 107.

⁴⁰ Diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, kiai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan tersebut di motori oleh Dewan pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 1993 diresmikanlah Badan arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI). *Ibid.*

ada persetujuan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.⁴¹

Pada periode pembentukan ini juga, peran cukup penting dan menonjol ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap sebagai representasi dari umat Islam dengan pemerintah. MUI dalam hal ini menjadi lebih pro-aktif dalam upaya peningkatan ekonomi umat. Tidak hanya sekedar melaksanakan tugas "stempel" masalah-masalah khilafiyah tetapi juga menjadi katalisator bagi kepentingan umat Islam yang lebih luas.

E. Penutup

Paparan deskriptif singkat di atas, memberikan penjelasan: bahwa benih SEI di Indonesia pada dasarnya telah ada sejak dahulu bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara melalui para pedagang muslim. Sikap dan perilaku dagang yang ditunjukkan menjadi salah satu bukti bahwa sistem yang di bawa para pedagang sesuai dan diterima oleh masyarakat Nusantara saat itu. Peranan pedagang (baca: pengusaha) muslim, pemerintah, ulama dan lembaga Islam lainnya pada periode pembentukan menjadi peran yang berjalan secara sinergis. Untuk itu, harmonisasi ini hendaknya tetap dijaga dan terus ditingkatkan. Jika kesimpulan ini disepakati sesungguhnya problem peningkatan ekonomi muslim bukanlah pada sisi lembaga keuangannya tetapi pada sisi sektor riil. Perdebatan apakah SEI ada atau tiada dikalangan para pakar, hanyalah sekedar untuk menegaskan bagi umat Islam untuk tidak sekedar ikut-ikutan atau sinis dengan sistem yang tidak bernuansa Islam. Dawan Rahardjo berpendapat bahwa perkembangan Islam di bidang ekonomi pada masa yang datang, akan diwarnai oleh tiga faktor: 1). Perkembangan kajian teologi dan diskursus pembaharuan yang memperkenalkan nilai-nilai Islam. 2). Keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga dan sektor informal yang merupakan basis perekonomian kaum muslimin di Indonesia dan di lain pihak berkembangnya usaha kaum muslimin di sektor modern berskala besar. 3). Berkembangnya dan berhasilnya eksperimen sistem ekonomi Is-

⁴¹N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (t.t.p.: Edinburg University Press, 1991), p. 10.

lam, terutama di bidang keuangan. Oleh karena itu, penguatan di bidang pendidikan dan riset ekonomi Islam kiranya harus terus ditingkatkan.

BIBLIOGRAFI

- Adnan, Muhammad Akhyar, "Metodologi Ekonomi Konvensional dan Penelitian Ekonomi Islami", dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, M. Amin Abdullah, dkk (Edt.), Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 200
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Aziz, M. Amin, "Nilai-Nilai Pengembangan Perekonomian dan Perbankan", dalam *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah; Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*, Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A. Rasyid, t.t.p.: Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), 2000
- Budiman, Arief, *Sosialisme, Kapitalisme dan Agama dalam Mencari Ideologi Alternatif; Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21*, Maksun (Edt), Bandung: Mizan, 1995
- Coulson, N.J., *A History of Islamic Law*, t.t.p.: Edinburg University Press, 1991
- Damami, Mohammad, *Akar Gerakan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000
- Damanhuri, L. Didin S., "Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam", dalam *Muhammadiyah dan Reformasi (Almanak Muhammadiyah 1420 H)*, Nurhadi M. Musawir, dkk (Edt.), Yogyakarta: Aditya Media, 2000
- David L. Sills (Edt.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, 17 Vol, New York: The Mac Millan Company & The Fred Press, 1972
- Hefner, Robert W., "Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Indonesia", dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam; Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1999
- Higgins, Benjamin, *Indonesia's Economic Stabilization and Development*, New York: t.n.p., 1959 Sartono Kartodirjo (Edt), *Sejarah Nasional*

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1977

Karim, Adiwarmarman (Edt), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT, 2000

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, M. Sonhadji, dkk (Edt.), Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Muhammad, Goenawan, "Sub-Sistem Ekonomi Islam Sebagai suatu Model", dalam *Sepercik Pemikiran tentang Ekonomi Islam*, M. Natsir Arsyad (Penyt.), Yogyakarta: Ananda, 1985

Muhammadiyah, PP., *Himpunan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Bandung: Sumber Jaya, 1971

Mul Khan, Abdul Munir, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Prespektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990

Nasution, Khoiruddin, "Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam", dalam *Millah*, Vol. III No. 2, Januari 2002

_____, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemia, 1996

Quraisy, Mujahid, "Dinamika Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia", dalam *Muqaddimah* No. 12 thn. VII, 2002,

Rahardjo, M. Dawam, "Sejarah Ekonomi Islam (Pengantar)", dalam *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarmarman Karim (Edt), Jakarta: IIIT, 2000

_____, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, cet.1, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat [LSAF], 1999

_____, "Sistem Ekonomi Alternatif", dalam *Sepercik Pemikiran tentang Ekonomi Islam*, M. Natsir Arsyad (Penyt.), Yogyakarta: Ananda, 1985

Salam, Yunus, *Riwayat Hidup K.H. Ahmad Dahlan; Awal dan Perdjoanganja*, Djakarta: Depot Pengadjaran, 1968

Shiddiq, Mohammad Nejatullah, "Studi Terkini Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Survai", dalam *Sejaran Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarmarman Karim (Edt), Jakarta: IIIT, 2000

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1996

Webster, Noah, *Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged*, second edition, t.t.p.: William Collins Publisher, Inc., 1980

Syahnudi, S.Ag. adalah mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.